

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bobi, 2002. *Modul latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan, kelembagaan dan Peraturan*. Yogyakarta: Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis kearah pemahaman metode aplikasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance, Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Etzioni, Amitai. 1982. *Organisasi-organisasi Modern*, Jakarta: UI Press Pustaka Bradjaguna.
- Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian daerah*. Malang : Averros Press.
- Lexy J., Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- North, North DC. Institutions, 1990. *Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Phil A., Susanto, 1989. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Binacipta.
- Purwandanu, Didik. 2013. *Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat dalam Memo Kebijakan: PATTIRO*.
- Scott, W. R. *Institutions and Organizations (Ideas and interest)* Third Edition, (Stanford University: sage Publications, 2008), hlm 48

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Tony, dkk., 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*, World Forestry Center.

Wiryanto F. 1986. *Membangun masyarakat*, Bandung: Alumnus.

Jurnal/tesis:

Adriana, Grahani, F, 2011. *Menyorot Kedudukan Dan Fungsi Mrp (Majelis Rakyat Papua) Dalam Otonomi Khusus Di Papua*. (jurnal)

Bonsapia, Sofia. 2008. *Pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis rakyat Papua menurut Otonomi khusus Papua*. (tesis).

Firdausy, Ardiana G. (tanpa tahun). *Menyorot Kedudukan dan fungsi MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam Otonomi Khusus di Papua*, (jurnal).

Harian umum Bintang Papua, edisi kamis 20 maret 2014, Melalui <http://www.bintangPapua.com/index.php/lain-lain/Papua/Papua-barat/item/14213-bram-siapa-pun-yang-korupsi-tempatnya-di-tahanan>, diakses pada minggu, 07 juni 2015, pukul 11:32 WIB.

Harian umum Radar Sorong, edisi senin, 09 desember 2013, melalui <http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=19285>, diakses pada minggu, 07 juni 2015, pukul 21:20 WIB.

Harian umum Sinar Haraman.co, edisi senin, 09 desember 2013. melalui <http://sinarharapan.co/news/read/29254/mrppb-cederai-kepemimpinan-Papua-barat->, diakses pada minggu, 07 juni 2015, pukul 21:04 WIB.

Kuswanto, Goto, 2012. *Pelaksanaan Good Governance di Indonesia*. <http://www.banyumaskab.go.id/read/1139/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia#.VTEqVkZg3IU>. Diakses tanggal 17 april 2015, pukul 22.54 WIB.

Magal, Martinus, 2011. *Peran MRP terhadap kebijakan pemerintah dalam perlindungan masyarakat adat Papua*, (jurnal).

Mardiasmo, 2002. *Konsep Good governance*.

<http://siradjhamzahinstitut.blogspot.com/2010/10/konsep-good-governance.html> Diakses tanggal 22 maret 2015, pukul 10.00 wita.

Mutiarin, Dyah. 2009. *Transformasi Good Governance dalam Perspektif Lokal: Perintisan Peraturan Daerah Tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas di Kabupaten Jayawijaya-Provinsi Papua*.

(jurnal) http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdyahmutiarin.staff.umsida.ac.id%2Ffiles%2F2012%2F02%2FJurnal-CSIS-Transformasi-Good-Governance-dalam-Perspektif-Lokal-Perintisan-Peraturan-Daerah-Tentang-Transparansi-Partisipasi-dan-Akuntabilitas-di-Kabupaten-Jayawijaya-Provinsi-Papua.doc&ei=NO8MVY7iM8GUuATY6ILYDw&usq=AFQjCNG11d_4vDYO144ZTHZTIIZeG1UuEQ&sig2=TCKNGFxfGZIPYAqiPhsaug&bvm=bv.88528373,d.c2E , Diakses pada tanggal 20 maret 2015, pukul 11.00 wita.

Syahyuti, 2009. *Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih Operasional*, (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor) dalam www.kelembagaandas.wordpress.com/pengertian-kelembagaan/syahyuti, diakses tanggal 23 April 2015, pukul 11.00 wita.

Winardi, 2003. *Organisasi Sosial*.
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_sosial, diakses tanggal 17 April 2015, pukul 15.00 wita.

Regulasi:

Keputusan MRP Nomor. III/KK-MRP/2009, Perlindungan, Pemberdayaan, Keberpihakan Orang Asli Papua.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.54 tahun 2004 tentang “Majelis Rakyat Papua”.

Peraturan Pemerintah Provinsi Papua Nomor. 4 Tahun 2005 tentang tatacara pemilihan anggota MRP

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.